

BAB IV

KONSTRUKSI ETIKA POLITIK AL-GHAZALI

A. Tauhid Sebagai Pondasi

Al-Ghazali memasukkan ilmu tauhid sebagai salah satu dari dua macam ilmu syari'at yang berkenaan dengan pokok-pokok agama (*ushûl*). Tauhid membahas tentang dzat Allah, sifat-sifat-Nya yang eternal (*al-qadîmah*), yang aktif-kreatif (*al-Fi'liyyah*), dan yang esensial (*al-dzâtiyah*), dengan nama-nama yang sudah dikenal. Juga membahas keadaan para Nabi, para pemimpin para umat terdahulu dan para sahabat. Begitu pula membahas tentang keadaan mati dan hidup, keadaan dibangkitkan dari kubur (*al-ba'ts*), berkumpul dimahsyar, perhitungan amal, dan melihat Tuhan.¹

Dari beberapa karya-karya Al-Ghazali, terutama karya beliau yang bernama *At-tibr Al-Masbûk fî Nashîhat Al-Mulk*, yang mana karya beliau ini ditulis sebagai nasehat untuk para penguasa, terutama nasehat untuk penguasa pada masa beliau sendiri, yaitu Sultan Malik Syah dan Perdana Menteri Nizamul Mulk dari Dinasti Saljuq. Dari setiap karyanya, khususnya dalam kitab Al-Ghazali *At-Tibr Al-Masbûk fî Nashîhat Al-Mulk*, beliau selalu mengawali karya-karyanya tersebut dengan pembahasan-pembahasan tentang tauhid yaitu kaidah-kaidah keimanan, yang mana

¹ Zurkani Jahja, *Teologi Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 64

objek material dari tauhid tersebut tentang Allah dengan segala sifat-sifat-Nya, kenabian dengan segala kaitannya, dan hari kiamat dengan segala kandungannya.

Dalam karyanya *At-Tibr Al-Masbûk fî Nashîhat Al-Mulk*, Al-Ghazali memulai naskah nasehatnya dengan kaidah-kaidah tauhid, hal tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan, apa relasi antara kaidah-kaidah tauhid dengan etika politik? Hal ini tentu sangat beralasan, *pertama*, karena kegelisahan Al-Ghazali dengan fenomena *Syi'ah Batiniyah* pada masa itu yang pelan-pelan meluas dan ditakutkan akan merusak Akidahumat Islam terutama akidah Sultan Malik Syah pada masa beliau, *kedua*, Selain untuk menguatkan keimanan (*basicfaith*) pemimpin dan menjaga dari aliran *Syi'ah Batiniyah*, Al-Ghazali juga ingin mengingatkan kepada Sultan bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah *Al-Khâlik* (Allah SWT).

Selain dua hal tersebut, tampaknya juga secara implisit Al-Ghazali memberi peringatan kepada Sultan bahwa kekuasaan Sultan hanyalah titipan Allah SWT. Allah memberi amanah kepada Sultan untuk menstabilkan Negara sesuai dengan syariat-Nya dan supaya Sultan memimpin dengan adil, dan dengan kaidah tauhid Al-Ghazali mengingatkan kepada para penguasa bahwa Allah Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Melihat apa yang dikerjakan bahkan apa yang terlintas di dalam hati, sehingga seorang pemimpin bekerja dan mengabdikan kepada rakyat dengan pengawasan dari Allah SWT.²

²Al-Ghazali, *Al-Tibr Al-Masbûk fî Nashîhat Al-Mulk*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988), h.1-4

Dengan kaidah-kaidah tauhid kita juga akan lebih mengenal tentang jati diri seorang makhluk apabila dibanding dengan khalik (sang pencipta) yaitu Allah SWT. Hal ini yang telah diungkapkan oleh Socrates “kenalilah dirimu, kenalilah dirimu”. Dalam kajian tauhid kita akan mengenal sifat *Ulûhiyyah* (Sifat Ketuhanan) yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah SWT, seperti sifat *Qudrat* (Kuasa) berarti kuasa adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan, kalau kita menganggap bahwa kitalah yang paling berkuasa di dunia ini berarti kita telah merampas sifat Allah SWT.

Kalau kita sudah kenal bahwa Allah bersifat *Qudrat* (Kuasa) maka kita akan kenal bahwa diri kita ini hanya orang yang lemah, maka pantaskah orang yang lemah untuk menyombongkan dirinya. Kalau kita kenal bahwa Allah bersifat *‘ilm* (berilmu) maka kita akan kenal bahwa diri kita bersifat jahil (tidak memiliki ilmu), maka pantaskah orang yang bodoh ini menyombongkan diri. Inilah yang menjadi pembahasan-pembahasan dalam ilmu tauhid, supaya kita dapat membedakan antara makhluk dan khalik.

Al-Ghazali membagi pembahasan tauhid menjadi dua bagian, *pertama, ushûl al-îmân* (pokok-pokok keimanan), *Kedua, furû’ al-îmân* (cabang-cabang keimanan).

a. *Ushûl îmân* (pokok-pokok iman), yaitu apa-apa yang berada di dalam hati manusia seperti *i’tiqad*, *ma’rifat* dan keyakinan kepada Allah SWT, Al-Ghazali membagi. Pokok-pokok iman ini menjadi 10 pokok:

- 1) Pokok pertama dari kaidah keimanan, Al-Ghazali mengingatkan kepada penguasa bahwa masih ada yang lebih berkuasa diatas seorang raja, yaitu yang menjadikan raja dan menjadikan seluruh alam semesta ini. Dan juga

dijelaskan tentang sifat-sifat Allah yang tidak ada satu orang pun yang dapat menyamai sifat Allah tersebut. Allah Tuhanyang wujud (ada) yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Allah Tuhan yang kekal tidak ada yang kekal selain Allah SWT, sehingga memberi kejelasan bahwa manusia semua akan binasa termasuk seorang raja, maka akan memberikan pelajaran kepada seorang raja agar menjalankan amanah dengan baik karena kepemimpinannya kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dan dijelaskan bahwa setiap sesuatu membutuhkan pertolongan Allah SWT, sedangkan Allah tidak membutuhkan pertolongan kepada siapapun karena Allah Maha Kaya dan Maha Besar.

- 2) Pokok kedua dari kaidah keimanan, yaitu menyucikan Allah SWT dari menyerupai seperti makhluk, bahwasanya Allah tidak berupa, tidak bertempat, Allah tidak turun, Allah tidak mempunyai mata, Allah tidak mempunyai tangan, karena sangat jelas disebutkan pada salah satu sifatnya yaitu “*Mukhâlafatuhu Ta’âla Lilhawâdits*” artinya tidak sama Allah dengan makhluknya, setiap apa saja yang terlintas di dalam hati manusia yang menggambarkan Allah SWT maka itu bukan Allah SWT, Allah hanya bisa dilihat di dalam akhirat. Firman Allah SWT Q.S. *Al-Qiyâmah/73:22-23*

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿التِّيَامَةُ: ٢٢-٢٣﴾

Artinya:

Wajah-wajah (orang mu'min pada hari itu) berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat. (Q.S. Al-Qiyâmah/73: 22-23)

- 3) Pokok ketiga yaitu menerangkan tentang *qudrat* (kuasa), maha suci Allah dari sifat lemah dan kekurangan. Sesungguhnya tujuh lapis langit, bumi, beserta segala isinya, arasy, kursi semuanya adalah ciptaan Allah dan dalam genggamannya kekuasaan-Nya. Tidak ada kerajaan melainkan kerajaan-Nya. Hal ini mengajarkan kepada penguasa agar tidak sombong dan semena-mena karena di atas seorang raja masih yang lebih berkuasa yaitu Allah SWT.
- 4) Pokok yang keempat yaitu *'ilm*, dijelaskan bahwa ilmu Allah ta'ala meliputi setiap sesuatu, sampai-sampai Allah MahaTahu jumlah pasir di dunia, jumlah bintang dilangit, jumlah setiap tetesan air hujan, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ (Al عمران : 119)

Artinya :

Allah ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati(QS. Ali 'imrân/3: 119).

يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿التَّسَاء : ٦٣﴾

Artinya :

Allah tahu apa yang ada di hati mereka (QS. Annisâ'/4 : 63)

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَمَا تَكْسِبُونَ ﴿الْأَنْعَام : ٣﴾

Artinya :

Allah tahu apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan tahu (pula) apa yang kamu usahakan (QS. Al-An'am/6 : 3).

- 5) Pokok kelima yaitu *sama'*(mendengar).
- 6) Pokok keenam yaitu *bashar* (melihat), Allah SWT Maha mendengar dan Maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia, sampai-sampai Allah mendengar derab langkah semut di malam yang gelap, serta suara ulat yang ada di dalam tanah. Hal ini mengajarkan kepada penguasa agar berkata dan berbuat dengan perbutan dan perkataan yang bijak sesuai dengan etika kepemimpinan.
- 7) Pokok yang ketujuh yaitu “*kalâm*”, bahwa Al-qur’ân, taurat, injil, zâbur yang diturunkan kepada para Nabi adalah *kalâm*(perkataan) Allah SWT. Sebagaimana ilmu Allah itu bukan dengan pikiran, mendengar bukan dengan telinga, dan melihat bukan dengan mata, begitu juga perkataan Allah bukan dengan mulut tetapi dengan sifat kalamnya.
- 8) Pokok keimanan yang kedelapan yaitu tentang perbuatan Allah SWT. Sesungguhnya seluruh alam serta isinya ini adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT, termasuk kekuasaan seorang raja tidak luput dari takdir dari Allah SWT. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menjadikannya. Allah maha kuasa dan maha perkasa.
- 9) Pokok yang kesembilan yaitu, mengingatkan penguasa kepada akhirat. Bahwa sebesar apapun pangkat seseorang pasti akan merasakan kematian. Apabila penguasa memimpin dengan baik maka dia akan masuk ke dalam syurga, akan tetapi apabila dia memimpin dengan zalim maka dia akan terjerumus ke dalam api neraka.

10) Pokok keimanan yang terakhir yaitu mengingatkan kepada penguasa agar selalu *ittibâ'* (mencontoh dan mengikut) sifat-sifat Rasulullah SAW, seperti adil, jujur, dan amanah dalam memimpin, serta menuruti akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa, contoh seorang pemimpin yang sukses dalam memimpin umat. Sebagai umatnya kita diperintah untuk mengikuti akhlaknya,

b. *Furû' imân* (cabang-cabang iman), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh, dari melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. *Furû' imân* ini oleh Al-Ghazali dibagi menjadi dua :

1) Hubungan antara manusia dengan Allah (*hablumminallâh*), seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan segala pekerjaan Sunnah, seperti membaca Al-Qur'an, sholawat, zikir, tasbih, dan tafakur.

2) Hubungan antara manusia dengan manusia (*hablumminannâs*), seperti sifat adil yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dan tidak berbuat zalim dan aniaya terhadap rakyat.³ Bagian ini lebih lanjut dan lebih dalam akan dibahas pada pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana konsep adil dan amanah menurut Al-Ghazali.

³*Ibid.*, hal.5, di sini Al-Ghazali lebih spesifik mencontohkan untuk berbuat adil bagi pemimpin, karena tentu buku ini adalah buku yang ditulis sebagai nasehat kepada Sultan pada masa beliau. tetapi juga sangat relevan sekali apabila dipelajari dan menjadi pedoman bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah zaman sekarang.

B. Keadilan dan Amanah Sebagai Tiang

1. Keadilan Sebagai Tiang Etika Politik Al-Ghazali

Dalam memanager pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur atau dalam Islam disebut “*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*”. Tidaklah berlebihan kiranya apabila para filsuf Muslim seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan filsuf lainnya meletakkan keadilan menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin.

Dalam kitabnya *al-tibr al-masbûk fî nasîhat al-mulk* Al-Ghazali menjelaskan bahwa adil berarti tidak berbuat zalim terhadap rakyat. Adil merupakan bagian dari cabang keimanan (*furu' Al-îmân*) sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa pemimpin bisa dikatakan adil apabila terpenuhi sepuluh syarat di bawah ini:

- a. Seorang pemimpin harus mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pemimpin, serta mengetahui bahaya dan kebinasaan apa yang akan didupatkannya apabila menjalankan kepemimpinan dengan tidak benar. Dan mengetahui keuntungan apa yang akan didapat apabila dia memimpin dengan adil. Sebagaimana hadis Nabi SAW :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ

Artinya:

“Manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil dan manusia yang paling dibenci Allah adalah pemimpin yang zalim”.

Dan sabda nabi SAW:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ السُّلْطَانُ الظَّالِمُ

Artinya:

“Manusia yang paling berat siksaan pada hari kiamat adalah Sultan yang zalim”.

- b. Mendekatkan diri dengan Ulama serta ada rasa rindu untuk selalu melihat dan berkumpul dengan Ulama, hal ini bisa dilakukan dengan duduk berbaur dengan rakyat di majelis-majelis mereka, sehingga mereka akan selalu mendengarkan nasehat-nasehat para Ulama. Menjauh dari Ulama yang jahat (*ulamâ' sî'*), yaitu Ulama yang rakus terhadap kehidupan dunia, mereka adalah Ulama yang tunduk kepada para pemimpin dan orang kaya supaya mendapatkan hadiah dan imbalan. Yang seharusnya adalah para pemimpinlah yang tunduk dan patuh kepada Ulama, karena Ulama adalah penerang bagi hati para pemimpin dan penunjuk bagi jalan yang benar.

Umar bin Abdul 'Aziz pernah meminta nasehat kepada Muhammad bin ka'ab Al-Qarazhy tentang adil: lalu Muhammad bin ka'ab berkata: “setiap muslim yang lebih besar usianya darimu maka jadikan dia ayahmu, setiap muslim yang lebih kecil usianya darimu jadikan dia anakmu, dan setiap muslim yang seusia denganmu maka jadikan ia saudaramu, hukumlah orang yang bersalah sesuai dengan kesalahannya, jangan mudah menyakiti dan memukul sesama muslim karena perbuatan yang demikian itu akan membawamu ke dalam api neraka”.

Suatu hari Umar bin Abdul ‘Aziz meminta nasehat kepada Abu Hazim: lalu Abu Hazim berkata: “apabila engkau hendak tidur maka letakkan kematian dibawah kepalamu, apabila engkau menginginkan sesuatu yang engkau sukai ingatlah kematian, dan apabila engkau hendak melakukan sesuatu yang tidak disukai maka ingatlah juga kematian, seolah-olah kematian itu akan datang”. Hendaknya cerita ini selalu berada di kelopak mata setiap pemimpin, dan para Ulama selalu memberi nasehat kepada para pemimpin dengan nasehat kematian.

- c. Jangan menutup mata atas perbuatan zalim, karena sebagai pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan zalim rakyatnya sebagaimana diminta pertanggung jawaban atas kezaliman yang diperbuat dirinya sendiri.
- d. Pada dasarnya seorang pemimpin pasti dibayangi oleh penyakit sombong, oleh karena itu Al-Ghazali memperingatkan kepada pemimpin untuk tidak sombong dan berbangga diri atas kekuasaan, dan jadilah pemimpin yang pemaaf dan mampu mengendalikan amarah.

Nabi ‘Isa a.s pernah berkata (memberi nasehat) kepada Nabi Yahya bin Zakariya a.s: “Apabila ada seseorang yang mengingatkanmu tentang sesuatu yang benar, maka bersyukurlah kepada Allah SWT karena dia telah mengingatkanmu. Dan apabila ada seseorang berkata kepadamu atau tentang kamu pada sesuatu yang tidak benar maka kamu harus bertambah syukur kepada Allah SWT, karena kebbaikannya akan beralih ketanganmu dan dosamu akan berpindah kepadanya”.

- e. tidak pernah merasa nyaman, tenang, dan tentram selama masih ada rakyat yang menderita, kelaparan, dan tidak punya tempat tinggal. Artinya bahwa seorang pemimpin belum bisa dikatakan menjadi pemimpin yang adil apabila masih ada rakyatnya yang menderita seperti kelaparan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari yaitu pada perang badar, beliau duduk dikenaungan, kemudian Malaikat Jibril turun dan berkata: “Wahai Muhammad, kamu duduk dikenaungan sedangkan para sahabatmu kepanasan di bawah terik matahari”, serentak Rasulullah terkejut dengan apa yang beliau lakukan lalu beliau bangun dan menemui sahabatnya.
- f. Mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, kata Al-Ghazali: “Janganlah seorang pemimpin sibuk dengan urusan ibadah (ibadah Sunnah), sedangkan rakyat menunggu didepan pintu rumah untuk meminta pertolongan darinya, karena mengabaikan hajat orang muslim lebih utama dari beribadah Sunnah”.

Suatu hari Umar bin Abdul Aziz sibuk mengurus rakyat sampai tiba waktu zuhur, setelah sholat zuhur karena merasa lelah setelah mengurus rakyatnya beliau masuk ke dalam kamar, untuk istirahat sebentar sekedar menghilangkan kepenatan, lalu anak beliau masuk ke dalam kamar dan berkata: “Wahai ayahanda, bagaimana misalnya ayah sekarang meninggal dunia? sedangkan di luar masih banyak rakyat yang menunggu bantuan ayahanda?..” maka Umar bin Abdul Aziz berkata: “Benar perkataanmu wahai anakku”, lalu beliau bangun dan langsung menemui rakyatnya.

- g. Seorang pemimpin harus bersifat *qanâ'ahdi* dalam segala hal, jangan menyibukkan diri dengan pakaian yang megah dan makanan yang enak. Al-Ghazali berkata bahwa tidak ada keadilan bagi pemimpin yang tidak *qanâ'ah*. 'Umar bin Khattab selalu meminta pendapat kepada sahabat lain tentang pakaian yang dipakainya, apakah ada pakaian yang tidak mereka sukai tentang pakaiannya.
- h. Sabar, kasih sayang, serta lemah lembut dalam menghadapi bawahan dan rakyat. Karena seorang pemimpin yang berjiwa dan bersifat sabar dan lemah lembut akan ditaati oleh bawahan dan rakyatnya, tetapi sabar di sisni bukan sabar terhadap pelanggar hukum Allah SWT.
- i. Berusahalah menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, sebagaimana sabda nabi SAW kepada sahabatnya: “Sebaik-baik umatku adalah apabila orang-orang mencintaimu dan kamu mencintai mereka, dan sejahat-jahat amatku adalah apabila orang-orang marah kepadamu dan kamu marah kepada mereka, orang-orang melaknatmu dan kamu melaknat mereka. Hendaknya seorang pemimpin tidak tetipu dengan pujian orang kepadanya, dan menganggap bahwa rakyatnya senang kepadanya, barangkali pujian itu hanya rasa takut seorang rakyat kepada pemimpin, padahal mereka tidak benar-benar memuji dan senang kepadanya. Tetapi hal yang tepat adalah hendaknya seorang pemimpin selalu bertanya kepada rakyat tentang dirinya, agar dia tahu apa saja kekurangannya yang menjadi pembicaran orang-orang, agar dia dapat memperbaiki dirinya”.

j. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, seorang pemimpin memang semestinya harus berusaha menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat, tetapi untuk dicintai oleh rakyat tidak harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah SWT. Maksudnya, biarlah kita dibenci oleh manusia asalkan Allah SWT ridha dan sayang kepada kita, tidak sebaliknya berusaha supaya dicintai manusia tapi Allah murka kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kebencian manusia, maka Allah dan manusia akan cinta kepadanya, dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah dan manusia murka dan benci kepadanya”. Seperti tidak memerintahkan berbuat taat, tidak mengajari mereka ilmu agama, dan memberikan makanan yang haram.

Keadilan melahirkan kemuliaan,Kezaliman menyebabkan kesengsaraan, Allah membantu Negara yang adil meskipun kafir, dan tidak membantu Negara yang zalim meskipun beriman.⁴ Pernyataan ini menyiratkan akan urgensi tegaknya keadilan. Karena memang keadilan dan kezaliman sesuatu yang bertolak belakang, manakala keadilan datang maka kezaliman akan sirna demikian juga sebaliknya. Seperti halnya siang dan malam tidak pernah bersatu tetapi datang dan pergi silih berganti.Semua orang sepakat bahwa tegaknya keadilan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi apa yang dijadikan barometer untuk menimbang? Masih menjadi perdebatan.

⁴Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Ibnu Taimiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 13

2. Amanah Sebagai Tiang Etika Politik Al-Ghazali

Al-Ghazali memandang amanah sebagai etika politik, bukan sebagai prinsip politik. Sebab itu dia memandangnya sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah, mulai dari yang rendah sampai kepala negaranya, supaya berlaku jujur dan amanah di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Di dalam kitabnya “*Ihyâ*” juz II Al-Ghazali mengecam para penguasa dan pejabat pemerintah yang tidak jujur dan tidak amanah, dan memberi nasehat kepada seluruh rakyat agar tidak tunduk dan patuh terhadap penguasa yang tidak amanah⁵.

Segala tindakan yang mencerminkan tidak amanahnya para penguasa pada masa Al-Ghazali seperti korupsi, suap, dan pemerasan diungkapkannya dengan perkataannya; “...sesungguhnya keadaan keuangan pemerintah di zaman kita ini seluruhnya berasal dari harta yang haram. betapa tidak demikian, karena para penguasa merampas harta rakyat dengan zalim, seperti korupsi, pungutan liar, dan suap. Sedangkan segala jalan yang halal seperti zakat, fai (harta kemenangan), dan ghanimah (harta rampasan), semuanya tidak masuk dalam kas Negara (karena dihabiskan oleh para penguasa). Sesungguhnya cara-cara yang zalim itu melanggar batasan hukum syari’at”.⁶ Demikianlah Al-Ghazali mengungkapkan segala pelanggaran-pelanggaran terhadap amanah yang diberikan rakyat kepada penguasa.

⁵*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 202

⁶*Ibid.*, h. 202.

Sikap amanah harus dimiliki oleh para penguasa dan pejabat pemerintah dari pejabat rendah sampai kepala Negara. Amanah harus menjadi keperibadian Negara, yang mencerminkan watak dan tabi'at amat dan bangsa seluruhnya. Al-Ghazali menganjurkan supaya diadakan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dan terhadap segala kecurangan dan kepalsuan yang bertentangan dengan sifat amanah itu. Harus dibuat undang-undang yang mengatur dan menetapkan sifat kejujuran di dalam semua jabatan pemerintahan, yang menaungi seluruh rakyat dari segala perbuatan korupsi, curang, suap, dan sebagainya.⁷ Demikianlah Al-Ghazali menggambarkan sifat amanah sebagai etika politik.

C. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Sebagai Benteng

Sebagai ilmuan yang memiliki pemikiran dan jiwa yang tajam, Al-Ghazali berusaha menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam memperbaiki pemerintahan. Yang menarik, beliau tidak terjun langsung di dalam praktisi pemerintahan, namun ia berposisi sebagai Ulama yang berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar kepada umara, bukan sebagai oposisi akan tetapi sebagai mitra memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah

⁷*Ibid.*,h. 203

merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Bahkan orang yang diam terhadap kemunkaran adalah orang dilaknat oleh Allah SWT.

Al-Ghazali mengumpamakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu benteng yang kokoh untuk mempertahankan agar Negara selamat dan terjaga dari gangguan-gangguan dari luar yang akan merusak moral dan etika suatu bangsa.⁸ Benteng yang pertama dijaga oleh seluruh umat, benteng yang kedua dijaga oleh para Ulama, dan yang ketiga dijaga oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah :

1. Tugas Umum Seluruh Umat

Diantara kewajiban asasi dalam Islam adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana halnya Allah SWT memuji orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah SWT mencela orang-orang yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, Allah SWT berfirman:

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ﴿المائدة: ٧٨-٧٩﴾

Artinya :

“Orang-orang kafir dari bani israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.” (Q.S. Al-Mâ'idah/5: 78-79).

⁸Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 234

Dengan demikian, seorang Muslim bukan semata-mata baik terhadap dirinya sendiri, melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat serta duduk di lingkungan khusus, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi di masyarakat. Muslim yang sebenar-benarnya adalah Muslim saleh pada dirinya dan sangat antusias untuk memperbaiki orang lain. Dialah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-‘ashr/103: 1-3

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١﴾ العصر: ١-

﴿٣﴾

Artinya:

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. Al-‘Ashr/103: 1-3).

Tidak ada keselamatan bagi seorang Muslim dari kerugian dunia dan akhirat, kecuali dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran yang biasa diistilahkan dengan amar ma’ruf nahi munkar. Setiap kemunkaran yang terjadi pada suatu masyarakat Muslim disebabkan oleh kelengahan masyarakat Muslim itu sendiri yang tidak peduli terhadap perbuatan-perbuatan kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, andai saja setiap Muslim memiliki jiwa amar ma’ruf nahi munkar niscaya kemunkaran tidak akan terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا

فَلْيُعِزَّهُ يَدَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Said al Khudry ra berkata,”Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,”Barang siapa dari kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, apabila tidak bisa maka dengan lisannya, apabila tidak bisa maka dengan hatinya, dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR Muslim).

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengubah kemunkaran merupakan kewajiban setiap muslim. Sesuai dengan urutannya dalam hadis Nabi SAW, setiap muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan kemunkaran dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan perkataan, Jika tidak mampu juga, cukuplah dengan hati kita yaitu dengan caramengingkari dan menolaknya, bukan justru mendukungnya. Akan tetapi, pada umumnya umat Islam saat ini kurang peduli terhadap kemunkaran yang merebak di masyarakat, atau ia langsung memilih alternatif yang ketiga, yaitu mencegah kemunkaran dengan hatinya, padahal dia belum mencoba mencegah dengan tangannya atau dengan lidahnya.

Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik apabila sesuai dengan ajaran Islam dan akal, sehingga ukuran kebaikan itu tidak terletak pada subjektivitas perseorangan. Kita sering mendengar sesuatu baik, tetapi baik menurut siapa dulu? Baik dalam *musthalah al-islâm* adalah baik menurut Allah dan baik menurut akal. Sedangkan munkar adalah sesuatu yang diinkari oleh akal dan ajaran agama Islam, sehingga cara memahaminya harus dikembalikan kepada Islam itu sendiri. Firman Allah SWT :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴿آل عمران: ١١٠﴾

Artinya :

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...” (Q.S. Ali ‘Imrân/3 : 110).

Menurut Yusuf Al-Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Ayi Sofyan dalam bukunya etika politik Islam menetapkan empat syarat melakukan amar ma’ruf nahi munkar:

- a. Perkara tersebut disepakati kemunkarannya. Artinya, kemunkarannya ditetapkan berdasarkan nash syara’ yang tegas dan jelas, atau berdasarkan kaidah-kaidah yang pasti (*qath’i*), setelah melalui penyelidikan. Perkara tersebut adalah sesuatu yang jelas keharamannya sehingga pelakunya berhak mendapat siksa, baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang, maupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Baik yang termasuk dosa kecil maupun dosa besar.
- b. Kemunkaran dilakukan secara terang-terangan atau dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan benar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: *“Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran...”*, mencegah kemunkaran harus berdasarkan penglihatan mata, bukan mendengar dari orang lain.
- c. Adanya kemampuan bertindak untuk mengubah kemunkaran. hal ini juga berdasar hadis yang sama. Siapa yang tidak mampu mengubah dengan tangan

maka dengan lisan, dengan lisan tidak mampu juga, maka cukuplah baginya menolak kemunkaran dengan hatinya.

- d. Tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Misalnya, pencegahan terhadap sebuah kemunkaran menimbulkan fitnah yang memicu pertumpahan darah.⁹

2. Tugas Para Ulama

Ulama adalah pewaris para nabi, mereka pelanjut estafet tugas kenabian yaitu menyampaikan wahyu Tuhan kepada seluruh manusia. Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik para Ulama adalah penerus tugas Rasulullah SAW sebagai pemberi nasehat dan peringatan kepada seluruh manusia. Setelah Rasulullah wafat maka tidak ada lagi rasul dan nabi. Karena Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir.

Para Ulama adalah juru dakwah dan berarti juga sebagai juru nasehat, yang membuka pengajian di mana-mana, seperti di mesjid, majelis, pesantren dan lain sebagainya, untuk menyadarkan dan memberi pencerahan agar manusia selalu berada pada jalan yang lurus. Mengadakan ceramah, seminar, atau dalam bentuk apapun di gedung-gedung pertemuan umum atau tempat khusus, dengan mengadakan bahasan-bahasan ilmiah tentang ajaran-ajaran agama di dalam segala bidang. Menulis majalah, artikel, dan buku yang mengajak amat kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemunkaran.

⁹*Ibid.*, Ayi Sofyan, h. 327-328.

Menurut Al-Ghazali tugas yang paling berat bagi para Ulama ialah memberikan nasehat (amar ma'ruf nahi munkar) kepada para penguasa yang memegang kekuasaan dalam Negara, mulai dari pegawai terendah sampai kepadakepala Negara(dari kalangan sipil), Dan dari prajurit biasa sampai kepada jendral (di kalangan militer).Walaupun para Ulama tidak mempunyai senjata seperti tentara dan tidak mempunyai kekuasaan seperti raja, tetapi mereka harus memiliki keberanian untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dengan mempertaruhkan nyawa.Tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas berat yang diemban oleh para Ulama, hal ini, disetarakan dengan jihad di jalan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW“Ucapkanlah kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim”.

Al-Ghazali mengecam para Ulama yang mendekati diri kepada para penguasa dengan tujuan mendapatkan harta mereka, apalagi menerima pemberian dari penguasa untuk membungkam mulut mereka, sehingga menjadikan diri mereka kecil dan hina dihadapan para penguasa.Mereka dinamakan *ulamâ' sū'*(Ulama jahat) yang merusak Islam, dan *ulamâ' ad-dunyâ* (Ulama dunia).Sehingga para Ulama yang seharusnya bertugas membentengi para penguasa dari perbuatan jahat malah mereka sendiri yang terjerumus kepada perbuatan jahat.

Menurut Al-Ghazali, seorang ulamayang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, seharusnya bukan hanya pandai dalam berceramah dan menguasai ilmu agama saja, tetapi seharusnya juga mengerti tentang ilmu politik, agar mereka dapat menghadapi para penguasa dan para pejabat pemerintah, tidak dibodohi, dan

diperalat oleh penguasa. Untuk itu, para calon Ulama yang suatu hari nanti akan mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, harus dibekali dengan ilmu politik. Bahkan Al-Ghazali menganjurkan berdirinya Akademi politik disuatu Negara.

Banyak contoh Ulama pada zaman dulu yang berani bersuara lantang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasehat kepada para penguasa seperti di bawah ini:

- a. Atha' bin Abi rabah, adalah seorang Ulama yang berani menjalankan amar ma'ruf nahi munkar terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa pemerintahan Umayyah, hal tersebut terjadi pada suatu majelis yang dihadiri oleh pembesar-pembesar daerah. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap puteranya yaitu Walid bin Abdul Malik. Keberaniannya itu sangat dikagumi oleh Umar bin Abdul Aziz (yang kemudian menjadi khalifah menggantikan Walid) yang ikut menghadiri nasehat itu.
- b. Hasan Basri, seorang Ulama besar yang berani memberi nasehat kepada Gubernur Hujjaj di dalam suatu majelis yang dihadiri oleh para fuqaha dari Basrah dan Kufah. Beliau juga pernah memberi nasehat kepada Gubernur Iraq Ibnu Hubayrah mengenai soal politik yang sangat bertentangan dengan politik pemerintahan Umayyah di masa itu.
- c. Ibnu Abi Zuayb dan Imam Awza'i, di zaman Khalifah Al-Mansûr dari Abbasiyah, memperingatkan Khalifah dengan ancaman-ancaman Tuhan jika menyeleweng dari keadilan.

- d. Sufyan Tsauri, yang memberi nasehat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Ahmad bin Hambal di zaman Khalifah Makmun.
- e. Dan Al-Ghazali, yang sering memberi nasehat kepada Sultan Malik Syah dan Perdana Menteri Nizamul Mulk dari Dinasti Saljuk, nasehat yang diberikan oleh Al-Ghazali kebanyakan diberikan di majelis yang dipimpin oleh Al-Ghazali sendiri, pada masa itu para pemimpin yaitu Sultan Malik Syah dan Perdana Menteri Nizamul Mulk sering mendatangi Al-Ghazali untuk meminta nasehat dan konsultasi tentang masalah pemerintahan. Bahkan untuk memberi nasehat beliau bersedia menulis sebuah buku yang berjudul *At-tibr Al-Masbûk fî Nashîhat Al-Mulk* yaitu buku yang berisi kumpulan-kumpulan nasehat kepada raja.

Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar Al-Ghazali tidak hanya menggunakan lisan atau teguran secara langsung kepada para penguasa dan pejabat pemerintah tetapi juga melalui surat, yang dikirim beliau kepada para penguasa dan pejabat pemerintah pada masa beliau yang melakukan kezaliman-kezaliman seperti korupsi, suap, dan pemerasan terhadap rakyat kecil. Penulisan surat ini dikenal dengan nama *Rasâil Al-Imâm Al-Ghazâlî*, Al-Ghazali mengirim surat kepada Sultan Sanjar putera Sultan Malik Syah, yang memerintah di Khurasan, dalam surat itu berisi kritikan yang sangat pedas kepada Sultan, yang isinya: "*Sungguh kasihan nasib rakyat yang memikul penderitaan dengan membayar pajak, sebaliknya tuan bergelimang harta, dengan kuda yang membawa bongkahan emas*".

Kemudian Al-Ghazali juga pernah mengirim surat kepada Fakhrul Mulk yang berbuat semena-mena dan zalim terhadap rakyat, dalam surat itu digambarkan tentang penderitaan dan kelaparan yang diderita oleh rakyat akibatnya perbuatannya, yang berbunyi “Sadarlah tuan, bahwa perkataan-perkataan yang saya kemukakan ini adalah pahit dan pedas, yang tidak seorang pun berani mengemukakannya. Maka pikirkanlah wahai tuan”.¹⁰

Dari uraian-uraian di atas terlihat nampak bagaimana pentingnya peran ulama dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar dalam pemerintahan. Berhasil atau tidaknya, maju atau tidaknya satu pemerintahan tergantung atas ulamanya, apabila ulamanya baik maka rakyat dan para pemimpin pun juga akan baik, tetapi sebaliknya apabila ulamanya rusak maka rakyat dan pemimpinnya pun juga akan rusak. Sebagaimana perkataan Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyâ’ ‘Ulûm Al-Dîn*: “Kami mengingatkan bahwa amar ma’ruf pertamanya adalah pengenalan antara baik dan buruk, kedua nasihat, ketiga memberi peringatan keras, dan keempat mencegah dengan memukul atau hukuman. Apabila dengan seorang penguasa maka cukuplah dengan pertama dan kedua, karena sulitnya dengan yang ketiga dan keempat.”¹¹

Amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan kepada seorang pemimpin tidak diharuskan oleh Al-Ghazali dengan cara ketiga atau keempat yaitu teguran keras dan perlawanan, cukuplah dengan pengenalan dan nasihat karena Al-Ghazali menyadari hal itu tentu sulit dilakukan, kecuali bagi orang diberi keberanian melakukan hal itu.

¹⁰*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 194-195

¹¹Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûm Ad-dîn II*, (Surabaya: Al-Haramain, tt), h.337.

Sebenarnya yang menjadi impian Al-Ghazali dalam pemikiran etika politiknya adalah seorang pemimpin dan pejabat pemerintah yang mendekati diri kepada ulama, dan duduk di majelis-majelis mereka berbaur dengan rakyat untuk mendengar nasehat-nasehat ulama, sehingga moral mereka akan selalu terjaga.

3. Tugas *Ahl Al-Hisbah* atau *Muhtasib*

Menimbang karena sangat pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar untuk memelihara etika masyarakat dan para pemimpin, maka Al-Ghazali berpendapat bahwa selain para Ulamayang bertugas menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka harus ada pula petugas khusus dan resmi yang diangkat oleh Negara, Yaitu yang dinamakan "*Hisbah*" sedangkan petugas-petugasnya dinamakan "*ahl al-Hisbah*" atau "*muhtasib*". *Hisbah* pertama dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644M), yang dipimpin oleh beliau sendiri sebagai kepala Negara. Mulanya lembaga ini belum bernama *Hisbah*, baru kemudian bernama *Hisbah* ketika pemerintahan Khalifah III Mahdi dari Abbasiyah (158-159 H/775-785 M).¹²

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib untuk dilaksanakan. Supaya terlaksananya misi ini serta terlepas dari tanggung jawab, maka pemerintah harus mengangkat dan memilih pejabat yang bertugas dalam bidang ini. Pejabat-pejabat *Hisbah* ini bukan dari unsur-unsur manusia yang mudah ternodai dengan politik suap menyuap, dan tidak pilih kasih dalam menjalankan

¹²*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 241.

tugasnya. Kehadiran pejabat Hisbah dalam masyarakat adalah untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang merasa telah terzalimi dari pihak lain.¹³

Al-Mawardi mendefinisikan bahwa Hisbah dengan “memerintahkan berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dilakukan, dan melarang kemunkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemunkaran itu dilakukan”. Karena itu menurut teori Al-Mawardi, Hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut muhtasib atau wali al-Hisbah. Al-Mawardi memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki muhtasib (petugas Hisbah) ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.

Ahl Al-Hisbah tidak berhak memutuskan hukuman sebagaimana halnya seorang hakim, tidak berhak menuntut seperti tugas seorang jaksa, dan tidak berhak menahan seperti tugasnya polisi, tetapi ia berhak melaporkan orang-orang yang bersalah ke polisi dan menyeret ke pengadilan.¹⁴ Ruang lingkup dan tanggung jawab lembaga hisbah meliputi dua hal penting, yaitu menyeru berbuat kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*nahi munkar*).

- a. Aspek pertama *amar ma'ruf* mencakup:

¹³ A. Rahmat Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2006), h.61

¹⁴ *Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 242.

- 1) Hukum-hukum Allah(*hudûdullâh*) atas dua aspek:
 - a) Mengenai masyarakat umum, mengajak manusia untuk melaksanakan sholat jum'at, mengawasi jalannya sholat jum'at, dan memperingati supaya pada waktu sholat jum'at dilaksanakan segala kegiatan supaya dihentikan, seperti jual beli.
 - b) Mengenai hak individu, misalnya mengajak manusia untuk mengerjakan sholat pada waktunya.
 - 2) Hak-hak manusia (*huqûq al-adamiyyîn*), mencakup:
 - a) Hak umum, melaporkan ketiadaan air minum, kerusakan sarana-sarana umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang menjadi hak seluruh rakyat
 - b) Hak pribadi, membela hak-hak asasi manusia seperti memperhatikan nasib buruh atas keterlambatan pembayaran gaji, membantu orang yang tidak dibayar hutangnya.
 - 3) Hak-hak Tuhan dan manusia (*musytarak*), banyak hal yang berkaitan dengan masalah ini, misalnya perwalian nikah untuk anak-anak yatim, memberi nasihat kepada wanita-wanita supaya menaati hukum-hukum Allah mengenai bilangan '*iddah*, dan menasehati seluruh lapisan masyarakat untuk mentaati kode etik baik pemimpin, rakyat maupun propesi-propesi lain.
- b. Aspek kedua nahi munkar mencakup:
- 1) Hak-hak tuhan (*Huqûqullâh*), meliputi:

- a) Urusan ibadah, yaitu meliputi tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dan penyelewengan dalam masalah peribadatan yang diwajibkan oleh Allah SWT, muhtasib memiliki kewenangan untuk memaksa orang untuk melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, dan naik haji.
 - b) Urusan larangan agama (*mahzhûrât*), mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti korupsi, suap, mencuri, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, minum minuman keras dan lain-lain. Dibidang perekonomian juga bisa bertindak sebagai pengawas terhadap kegiatan produksi pasar-pasar. Kegiatan produksi harus diawasi menyangkut soal aspek kuantitas, kejujuran, dan kualitasnya. Mencegah adanya praktek-praktek yang merugikan dalam kegiatan pasar seperti pengurangan timbangan, penimbunan barang, dan penjualan melebihi dari harga umum.
 - c) Urusan-urusan kebendaan di dalam hubungan manusia, termasuk dalam bagian ini, pemerasan dalam masalah utang-piutang, pemalsuan barang-barang dan segala macam manipulasi dalam pergaulan manusia.
- 2) Hak-hak makhluk semata (*huqûq al-adamiyyîn Al-mahdhah*), yaitu perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk dalam bagian ini seperti:
- a) Gangguan keamanan terhadap tetangga yang berdekatan rumah, baik mengenai bangunan rumah maupun mengenai ketentraman hidup.

- b) Tidak beres dalam pembagian air minum, air pengairan sawah, penerangan listrik, beras, dan sebagainya.
 - c) Penghianatan tentang janji yang sudah diikrarkan di hadapan saksi.
- 3) Hak-hak tuhan dan rakyat (*musytarak*), misalnya: membuka tempat-tempat maksiat, seperti perjudian dan pelacuran.

D. Peran Ulama Dalam Pemerintahan Menurut Al-Ghazali

1. Definisi Ulama

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam Bahasa Arab “*’âlim*” yang secara harfiyyah berarti orang yang berilmu. lawan kata ‘*ilm* (ilmu) adalah *jâhil* (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama. Pada masa-masa pertama Islam yang dimaksud Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama.¹⁵ Pada masa *khulafâ’ al-Râsyidîn* tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, dan ilmu lain. Para sahabat umumnya memiliki pengetahuan ilmu keagamaan yang luas dan sekaligus sebagai pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada saat itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut “*Ahl al-Hilli wa al-Aqd*”.

Baru pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan seterusnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan

¹⁵ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramidana, 1998), h.61.

saja. Bahkan karena adanya pembedangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya ahli fiqih disebut fuqaha, ahli tafsir disebut mufassir, ahli tasawwuf disebut dengan mutasawwif, ahli hadis disebut muhaddis. Sementara orang yang memiliki ilmu kealamaan tidak disebut dengan ulama, tetapi disebut ahli dalam bidang masing-masing.

Di Indonesia, Ulamayang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian Ulama menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih. Di Indonesia Ulama identik dengan fuqaha. Bahkan dalam pengertian orang awam, Ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja. Betapapun semakin sempit pengertian Ulama dari dulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan yaitu orang yang memiliki ilmu agama yang di hatinya ada rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

Al-Ghazali membagi Ulama menjadi 3 bagian:

- a. *Ulama hujjah*, adalah Ulama yang ahli dalam ilmu agama, yang sangat mengutamakan perintah Allah.
- b. *Ulamahujjaj*, adalah Ulama yang berjuang menegakkan agama Allah SWT dan memberantas kezaliman.
- c. *Ulama mahjuj*, adalah Ulama yang rakus terhadap kehidupan dunia dan memperbudak diri terhadap penguasa yang zalim.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h.130

Ulama yang pertama dan kedua, adalah Ulama yang konsekwen terhadap tugasnya, yaitu sebagai pewaris para nabi, berjuang menegakkan keadilan dan menentang para pemimpin dan pejabat yang zalim. Ulama seperti ini dinamakan oleh Al-Ghazali dengan *ulamâ' âkhirat*, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 199.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

“Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan Harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala disisi tuhannya. Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungannya”.(Q.S. Ali Imran/3: 199).

Karakteristik Ulama akhirat menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya(Q.S. Ali Imran/3: 199)
- 2) Tidak menyuruh orang untuk berbuat sesuatu sebelum ia mengamalkannya (Q.S. Al-Baqarah/2: 44).
- 3) Mengamalkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, dan menjauhi perdebatan yang sia-sia.
- 4) Selalu beribadah kepada Allah dan mengamalkan ilmunya

- 5) Menjauhi penguasa yang jahat
- 6) Senang terhadap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT
- 7) Berusaha sekuat-kuatnya untuk mencapai derajat *haqqul yakîn*.
- 8) Senantiasa *Khasyyah* (takut) kepada Allah SWT, *Ta'zhîm* (mengagungkan) keberan-Nya, dan *Tawâdhu'* (rendah diri).
- 9) Menjauhi penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat yang dapat membatalkan amal dan kesucian hati
- 10) Memiliki ilmu yang berpangkal dalam hati, bukan di atas kitab, ia hanya *taqlîd* kepada hal-hal yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

Ulama ketiga dinamakan dengan *ulamâ' sû'* (jahat) yang menjual agama dengan harta dunia. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 187.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya”, lalu mereka melempar janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, amatlah buruk tukaran yang mereka terima”. (Q.S. Ali Imran/3: 187).

Ciri-ciri Ulama *sû'* atau Ulama jahat adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama yang orientasinya hanyalah demi kebahagiaan duniawi sebagaimana yang dilarang agama
- 2) Tidak *Qanâ'ah* Tidak puas dengan anugerah yang diberikan Allah kepadanya
- 3) *Materialistis* senantiasa mengendalikan jiwanya, sedangkan kehidupan *ukhrawi* hampir lenyap dari ingatannya.

2. Ulama Sebagai Penjaga Benteng Etika Politik.

Melihat dari sejarah, tentang relasi antara Ulama¹⁷ dengan umara pada masa Al-Ghazali yang tentunya berimbas kepada pemikiran politiknya tentang relasi yang harus dibangun antara Ulama dan umara, yaitu terbagi atas dua fase; *fase pertama*, Al-Ghazali mendukung pemerintahan dengan memberikan pemikirannya, *fase kedua*, Al-Ghazali menjauhkan diri dari urusan pemerintahan dan politik.

a. Ulama dan Umara Bersinergi dalam Membangun Pemerintahan

Relasi antara Ulama dan umara yang paling tepat menurut Al-Ghazali adalah, seorang umara atau pemimpin harus selalu mendekati diri kepada para Ulama dengan datang langsung ke rumah atau mejelis mereka, bukan sebaliknya Ulama yang mendatangi penguasa. Hal ini yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam karyanya *At-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk* "Hendaknya seorang pemimpin selalu rindu ingin melihat Ulama, dan bersangat ingin mendengar nasehat mereka (Ulama)". Dalam hal ini Al-Ghazali mencontohkan tentang seorang

¹⁷Yaitu Al-Ghazali sendiri yang berperan sebagai Ulama pada pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Sultan Malik Syah dengan Perdana Menteri Nizamul Mulk dari dinasti Saljuk

pemimpin yang datang langsung ke rumah seorang Ulama, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid yang datang langsung ke rumah Fudhail bin 'Iyadh untuk meminta nasehat.

Seorang umara diibaratkan seperti anak kecil yang harus dibimbing dan diawasi oleh orang tuannya, menunjukkan sesuatu yang baik dan melarang apabila sesuatu itu adalah perbuatan yang buruk. Ulama menurut Al-Ghazali harus berada di luar rel pemerintahan yang bertugas menjaga dan mengawasi hulu-hilirnya kereta api politik dan menjaga supaya rel tidak terlepas, yang apabila terlepas maka akan berakibat fatal bagi seluruh penumpang kereta api.

Sinergitas Al-Ghazali sebagai seorang ulama dengan umara terjalin ketika pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Sultan Malik Syah (465-485H/1072-1092M) dengan Perdana Menteri Nizamul Mulk. Pada masa ini para pemimpin dan pejabat pemerintah sangat menghormati dan patuh dengan ulama. Selain itu, perhatian mereka terhadap ilmu pengetahuan juga luar biasa. Sehingga tercatat dalam sejarah pada masa inilah Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam bidang politik, selain kemajuan mental dan spiritual Maliksyah juga dalam pembangunan fisik.

Kemajuan ini dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, dan yang paling masyhur adalah lembaga pendidikan yang bernama Madrasah Nizhamiyah (1067 M), yang kemudian menjadi Universitas ternama di

dunia.¹⁸ Hampir setiap kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang Nizhamiyah. Menurut Philip K. Hitti, Universitas Nizhamiyah inilah yang menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari.¹⁹

Dalam menciptakan sebuah Negara yang adil dan makmur, bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin dan para pejabat pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, terutama adalah para ulama. Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya ini, berkaca pada pemerintah zaman Rasulullah SAW dan *Khulafâ'Ar-Râsyidîn*. Seluruh golongan memberikan andil dalam terciptanya Negara yang adil dan makmur, sehingga dengan waktu yang singkat kaum muslimin pada saat itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Bertolak belakang sekali apabila dibanding dengan pemerintahan pada masa Al-Ghazali yaitu Pemerintahan Abbasiyah, Ulama menjauhkan diri dari urusan pemerintahan dan menganggap bahwa urusan pemerintahan adalah sesuatu yang kotor.

Umara diibaratkan seperti anak kecil yang harus selalu dibimbing oleh orang tuanya yaitu ulama, ditunjukkan untuk melakukan perbuatan yang benar dan diberi peringatan apabila melakukan perbuatan yang salah. Sebab itu, ketika Al-Ghazali berada di Baghdad yaitu pusat pemerintahan Sultan Malik Syah dengan Perdana Menteri Nizamul Mulk, Al-Ghazali mengundang seluruh ulama, untuk bersama-sama membangun Negara. Menurut *Ibnu Sabty*, kurang lebih 183

¹⁸M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011), h. 159.

¹⁹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman, Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), h.515

kali Al-Ghazali mengadakan pertemuan atau semacam majelis untuk mengajak para Ulama supaya bersama-sama membangun Negara. Menurut H.K. Sharwani sekitar 300 sampai 500 Ulama berkumpul di majelis Al-Ghazali, hal ini menunjukkan kebesaran seorang Al-Ghazali.²⁰

b. Ulama Menjauh Dari Urusan Politik dan Pemerintahan.

Setelah Perdana Menteri Nizamul Mulk terbunuh dan kemudian diikuti dengan wafatnya Sultan Malik Syah. Al-Ghazali sangat kehilangan atas kematian dua tokoh penting ini, terutama Nizamul Mulk adalah contoh seorang pemimpin yang sangat dekat dengan ulama dan sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri pusat-pusat pendidikan pada saat itu, yang bernama Madrasah Nizamiyah. Sehingga dengan kedekatan Nizamul Mulk dan Sultan Malik Syah dengan Al-Ghazali terbukti Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam berbagai bidang terutama bidang ilmu pengetahuan.²¹

Sepeninggal Perdana Menteri Nizamul Mulk Dan Sultan Malik Syah, kemudian Dinasti Abbasiyah berturut-turut dipimpin oleh Sultan Mahmud (485-487 H/1092-1094 M), Sultan Barkiyaruq (487-498 H/1094-1103 M), dengan Perdana Menteri Fakhrul Mulk Dan Muayyid Al-Mulk. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada saat itu menjadi lemah dan lambat laun mulai mengalami kemunduran di berbagai bidang serta merosotnya moral dan etika para pemimpin

²⁰*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h.124.

²¹*Ibid.*, h.126

dan pejabat pemerintah. Mereka sudah mulai menjauhkan diri terhadap para ulama dan tidak ada lagi perhatian terhadap ilmu pengetahuan, sehingga para pemimpin dan pejabat pemerintah mulai melakukan korupsi dan berbuat zalim terhadap rakyat.

Sebenarnya Al-Ghazali sudah memberi nasehat kepada mereka, namun nasehat tersebut seakan tidak dihiraukan oleh mereka. Akhirnya Al-Ghazali memutuskan hijrah dari Thus untuk beberapa tahun, ia juga menyeru kepada para ulama lain agar tidak tunduk terhadap penguasa dan pejabat yang zalim pada saat itu. Al-Ghazali juga menganjurkan supaya ulama menjauhkan diri dari penguasa seperti itu.

Al-Ghazali menjelaskan ada tiga sikap yang harus dilakukan untuk menghadapi pemimpin yang tidak adil²²:

- 1) Menolak segala jabatan pemerintah yang ditawarkan padanya.

Ulama harus menolak setiap jabatan yang diberikan kepadanya. Dengan menerima jabatan dari penguasa atau pejabat yang zalim, berarti telah mendukung pemerintahan yang zalim. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Hanifah yang menolak tawaran menjadi hakim dari Khalifah II Al-Mansur. Abu Hanifah lebih memilih dipenjara daripada menerima jabatan itu. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal. Tetapi berbeda dengan apa yang telah dilakukan Qodhi Abu Yusuf yaitu murid Abu Hanifah yang bersedia menerima jabatan *Qâdhî Al-*

²² *Ibid.*, Al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûm Al-dîn II*, h. 140-151

Qudhâ dimasa Khalifah V Harun Ar-Rasyid. Tetapi Al-Ghazali tetap menghormati keputusan itu karena Qodhi Abu Yusuf dalam menerima jabatan itu mempunyai niat yang baik, yaitu untuk memperbaiki pemerintahan dan pejabat agar lebih baik.

- 2) Tidak menerima bantuan dari penguasa atau pejabat pemerintah yang zalim dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tetapi zumhur Ulama sepakat tidak membolehkan. Sedangkan Al-Ghazali dalam hal ini menjelaskan dengan detail dan membagi menjadi 4 rincian tentang boleh atau tidaknya kita menerima bantuan dari penguasa yang zalim :

- a) Hukum asal adalah haram, maka tidak boleh menerima semua bantuan dari pejabat yang zalim.
 - b) Boleh menerima, Apabila diyakini kehalalannya.
 - c) Boleh menerima, dengan tujuan untuk dibagikan kepada faqir miskin.
 - d) Menyelidiki terlebih dahulu, dari mana harta itu.
- 3) Tidak turut campur dalam urusan politik.

Pendapat yang ketiga ini menimbulkan kontroversi dikalangan para ulama lain. Karena dengan menjauhkan diri dari urusan politik, maka akan melumpuhkan semangat perjuangan untuk memberantas kezaliman di dalam pemerintahan. Tetapi untuk meredam kontroversi dan kecaman dari Ulama lain, Al-Ghazali memberikan dua alternatif untuk mengatasi hal ini:

- a) *Uzlah*, menjauhkan diri dari persoalan politik
- b) *Mukhâlathah*, berbaur dengan masyarakat dengan mengadakan perlawanan terhadap segala kezaliman.